

Perempuan Pejuang Sutra di Kabupaten Wajo: Aktor Tunggal dan Tantangan Akses Program Perhutanan Sosial

Women as Silk Warriors in Wajo District: Sole Actors and the Challenges of Access to Social Forestry Programs

Sukma Taroniarta¹ & Nurul Huda Yahya²

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi¹
Jalan Poros Malino kilometer 30, Bili-Bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan²

taroniarta@yahoo.com¹; nurulbpa@gmail.com²

Kronologi Naskah: diterima 30 Januari 2022, direvisi 8 Februari 2022, diputuskan diterima 11 April 2022

Abstract

Silk is a symbol of cultural grandeur in South Sulawesi. Complex business issues, and lifestyle changes within communities, has led to the silk industry being vulnerable to abandonment. Social Forestry, through a scheme to increase non-timber forest product businesses on community lands, can provide economic opportunities for silk-based businesses, which are dominated by women. This study is a qualitative study supported by quantitative data. Direct observations and in-depth interviews were conducted with several key figures in the silk business in Canru Village, Wajo Regency, South Sulawesi. The results of the study show that economic pressure is the main motivation for shifting roles in the silk business, but there are several other obstacles that threaten the sustainability of the silk industry, which has lasted for hundreds of years.

Keywords: women and silk, economy empowerment, KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial—Business Group of Social Forestry)

Abstrak

Sutra merupakan salah satu simbol kebesaran budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Kompleksitas permasalahan pegiat sutra serta dinamika gaya hidup yang telah disusupi budaya luar menyebabkan posisi sutra rentan untuk ditinggalkan. Perhutanan Sosial melalui skema peningkatan usaha hasil hutan bukan kayu di lahan rakyat memberikan peluang dan akses pengelolaan kepada para pegiat sutra yang kini didominasi oleh para perempuan. Secara sosial budaya, peran perempuan dalam industri sutra telah lama ada dan semakin kuat akibat terjadinya diversifikasi mata pencaharian. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dan didukung dengan data-data kuantitatif. Pengamatan langsung serta wawancara secara mendalam dilakukan ke beberapa tokoh kunci usaha persuteraan yang berada di Kampung Canru, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Hasil kajian menunjukkan tekanan ekonomi sebagai motivasi terjadinya pergeseran-peralihan peran dalam usaha sutra serta beberapa kendala yang mengancam keberlanjutan usaha sutra yang telah bertahan selama ratusan tahun.

Kata kunci: perempuan dan sutra, pemberdayaan ekonomi, KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial)

Pendahuluan

Satu dari agenda besar pemerintah terkait dengan pengelolaan hutan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). HHBK merupakan hasil hutan hayati, bisa berupa produk turunan ataupun budi daya dari nabati ataupun hewani dengan nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. HHBK menjadi salah satu sumber daya hutan penting lainnya selain kayu.

HHBK dapat bersumber dari hutan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan ataupun dari hutan. Dalam UU Kehutanan No. 41/1999, kedua hal

tersebut dimaknai sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang saling tidak dapat dipisahkan. Makna ini sejalan dengan asumsi bahwa hutan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat setempat (Damayantanti 2011). Masyarakat yang tinggal dan bergantung hidup pada hutan merupakan lingkungan sosial yang mempunyai hubungan timbal balik serta saling memengaruhi kondisi hutan.

Di beberapa pelosok daerah, pekerjaan mencari dan memungut hasil hutan bukan kayu kebanyakan masih dianggap sebagai kebiasaan yang bersifat tradisional

karena telah dilakukan secara turun-temurun. Kegiatan tersebut tetap dilakukan karena masyarakat masih mendapat nilai tambah yang bernilai ekonomi. Banyak petani di sekitar hutan menggantungkan hidupnya terutama pada hasil hutan bukan kayu, baik sebagai usaha sampingan guna menambah pemasukan atau sebagai pendapatan utama.

Pada umumnya, hasil hutan bukan kayu merupakan hasil turunan yang memiliki nilai tambah dari sebuah pohon; seperti buah, daun, kulit, getah, ulat, atau berupa tumbuhan-tumbuhan yang memiliki sifat khusus; seperti murbei, rotan, bambu, dan lain-lain. Nilai tambah itu menjadi peluang ekonomi yang mampu menjadi solusi alternatif untuk melestarikan hutan dan ekosistemnya sehingga manfaat hutan selain kayu tetap tersedia dan mampu menopang sumber penghidupan masyarakat setempat. Program Perhutanan Sosial dihadirkan oleh pemerintah untuk memastikan upaya-upaya pelestarian hutan berjalan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Perhutanan Sosial adalah program nasional kehutanan yang membuka akses kelola hutan bagi masyarakat sekitar. Sasaran prioritas program-program perhutanan sosial adalah masyarakat yang taraf hidupnya masih berada di garis kemiskinan serta kelompok-kelompok komunitas yang rentan dan cenderung terpinggirkan yang hidupnya sangat bergantung pada keberlanjutan hutan dan segala keanekaragaman hayati yang dihasilkan.

Salah satu HHBK yang menjadi komoditas unggulan yang prioritas untuk dikembangkan adalah sutra. Sutra alam telah lama menjadi salah satu dari lima komoditas HHBK unggulan nasional (Kementerian Kehutanan 2014). Sejak 2004, sutra menjadi salah satu program Gerbang Emas (Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat) yang dikembangkan di Sulawesi Selatan karena dinilai berkontribusi untuk peningkatan ekonomi lokal hingga nasional (Baso & Sudirman 2020).

Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah yang populer dengan salah satu produk turunan dari hasil hutan bukan kayunya, yaitu sutra. Berbeda dengan skema Perhutanan Sosial lainnya yang berada dalam kawasan, program Perhutanan Sosial juga hadir mendukung kelompok-kelompok usaha rakyat yang berada di luar kawasan dengan aktivitas utama pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Produksi sutra adalah salah satu usaha yang telah dikelola dan dikembangkan oleh kelompok-kelompok usaha berskala mikro yang melibatkan kaum perempuan.

Di tahun 2005, industri tenunan sutra Indonesia pernah berjaya menjadi salah satu penyumbang devisa dengan nilai ekspor produksi mencapai \$9.815.469. Hasil produksi sutra tersebut berasal dari 11.383 unit industri yang tersebar di 11 provinsi dan sebanyak 10.652 unit (93,58%) berada di Sulawesi Selatan. Pada masa itu, Sulawesi Selatan dikenal sebagai sentra terbesar kegiatan pertenunan sutra di Indonesia (BPA 2013).

Produksi pertenunan sutra alam Sulawesi Selatan sudah dikenal sejak tahun 1960. Semakin dikenal luas sebagai salah satu komoditas perdagangan unggulan karena letak Makassar sebagai ibu kota provinsi merupakan bandar transit sekaligus gerbang wilayah Indonesia bagian timur. Produksi sutra alam meski mengalami pasang surut, tetapi hingga saat ini Sulawesi Selatan masih merupakan produsen sutra terbesar di Indonesia.

Menurut Balai Persuteraan Alam (2013), perusahaan sutra di Sulawesi Selatan telah dikembangkan di 13 kabupaten. Terdapat tiga kabupaten yang menjadi pusat pengembangan persuteraan dan menjadi satu mata rantai produksi, yakni Kabupaten Enrekang dan Soppeng sebagai sektor hulu atau tahap praproduksi dengan fokus pengembangan tanaman murbei untuk pakan ulat, budi daya pemeliharaan ulat (*bombyx mori*) hingga menjadi kokon,¹ serta Kabupaten Wajo sebagai sektor hilir yang menjadi sentra pemintalan benang dan penghasil kain sutra sekaligus menjadi jalur distribusi dan pemasaran.

Dinamika perkembangan industri sutra menjadikan Kabupaten Wajo sebagai kabupaten yang menjalankan proses produksi secara utuh, mulai dari tahap prahingga pascaproduksi. Dominasi keterlibatan perempuan secara utuh dalam setiap tahap dan alur produksi sutra terjadi di Kelurahan Wallanae, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Hal ini terungkap saat dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh perempuan yang telah bergelut dalam usaha sutra secara turun-temurun serta didukung pengamatan langsung dan beberapa kajian literatur.

Perjuangan para perempuan pelaku usaha sutra di Kelurahan Wallanae, khususnya di Kampung Canru, mewakili potret perempuan lainnya yang tetap bertahan sebagai pegiat sutra lokal. Dengan demikian, penting untuk mengetahui peluang para perempuan pegiat sutra dalam mempertahankan keberlanjutan usaha sutra di masa mendatang. Apakah telah ada program-program pembangunan yang mendukung eksistensi mereka? Bagaimana para perempuan pegiat sutra ini mengakses program-program tersebut? Apakah mereka memiliki

keberdayaan untuk ikut memimpin, mengakses, dan mengontrol sumber daya yang tersedia? Realitas sosial ini menarik untuk dikaji dan diangkat agar pemangku kebijakan hadir memberikan dukungan yang tepat terhadap perubahan yang terjadi dan berkeadilan gender.

Metodologi Penelitian

Tulisan ini berangkat dari pengalaman perempuan pegiat sutra di Sulawesi Selatan. Pegiat sutra dalam tulisan ini didefinisikan sebagai orang yang terlibat aktif dalam proses produksi sutra, mulai dari budi daya ulat sutra beserta pakan murbei hingga menghasilkan benang dan lembaran kain sutra. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara secara mendalam disertai observasi langsung terhadap beberapa tokoh perempuan selaku pegiat sutra di Kelurahan Wallanae, Kabupaten Sanggalay, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

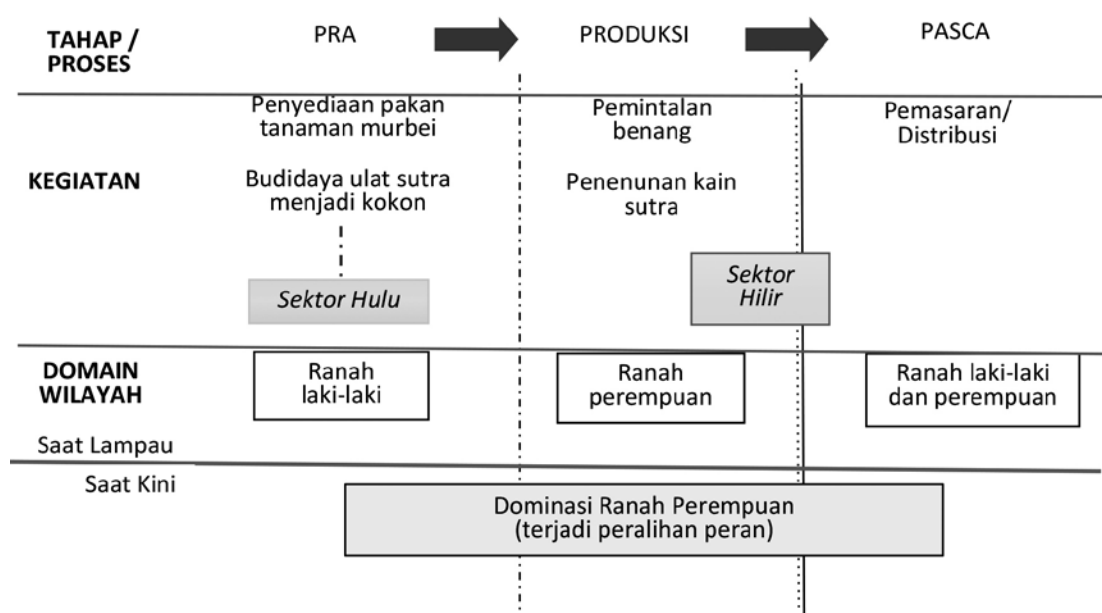
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tulisan ini menggunakan analisis gender sebagai pisau analisis untuk melihat peran perempuan pegiat sutra secara komprehensif. Penelitian dilakukan selain untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi berikut dampaknya dalam industri sutra, juga untuk memotret kondisi kelompok-kelompok persuteraan yang telah mendapatkan bantuan peningkatan kapasitas usaha. Hal ini penting bagi

peneliti yang bekerja sebagai birokrat sekaligus sebagai penggerak kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial dalam memberikan dukungan program-kebijakan bagi kelompok perempuan.

Peralihan Peran dalam Proses Produksi Sutra: Perempuan sebagai Pemain Tunggal

Proses produksi sutra tidak sesederhana yang dibayangkan. Proses ini membutuhkan kesabaran, keuletan, ketelitian, dan kerja sama yang baik antara pelaku usaha, termasuk pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Mulai persiapan lahan untuk penyediaan pakan ulat sutra dan ruang khusus untuk pemeliharaan sutra, kontinuitas stok pakan tanaman murbei, proses pemeliharaan ulat sutra sampai produksi kokon, pengolahan kokon menjadi benang sutra (pemintalan), penenunan menjadi kain tekstil, hingga distribusi dan pemasaran.

Dalam usaha persuteraan, banyak hal yang harus diselaraskan agar pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dapat adil dengan mempertimbangkan peran gender tradisional yang telah berlangsung lama di masyarakat. Laki-laki dalam peran gender tradisional diposisikan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Secara historis, dalam industri persuteraan dibutuhkan keterampilan dan ketelitian dari pembuat sutra. Pada tabel di bawah ini terlihat pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam proses produksi sutra.



Gambar 1. Peralihan Peran dalam Alur Produksi Sutra Alam

Sumber: Hasil Observasi & Pengolahan Data Primer KUPS-BPSKL Sulawesi (2021)

Dalam perjalanannya, peralihan peran mulai terjadi, proses produksi sutra kini nyaris 90% dilakukan oleh perempuan. Pembagian peran yang awalnya terbagi berdasarkan domain wilayah kerja telah bergeser bahkan beralih total akibat tingginya tuntutan kebutuhan ekonomi di rumah tangga para pegiat sutra. Hampir semua tahap produksi sutra telah didominasi oleh kaum perempuan. Laki-laki telah beralih ke pekerjaan lain yang dianggap lebih menghasilkan. Masyarakat mulai berpikir praktis. Mencari sumber pendapatan lain yang dianggap lebih mudah dan cepat menghasilkan. Pola nafkah rumah tangga para pegiat sutra pun berubah sehingga terjadi diversifikasi mata pencaharian.



Gambar 2. Perempuan Memotong Tanaman Murbei di Pekarangan

Sumber: BPSKL Sulawesi (2021)

Lahan-lahan garapan yang awalnya diperuntukkan untuk kebun murbei (pakan ulat) kini berganti menjadi komoditas lain yang secara ekonomi diasumsikan lebih cepat dan lebih laku di pasaran sehingga akan lebih mudah memberikan nilai tambah. Tanaman jagung dan palawija menjadi pilihan tanaman pengganti murbei.

Di Kampung Canru, kepemilikan lahan garapan hanya berkisar 1—2 hektare. Tanaman murbei kini lebih banyak dijumpai di pekarangan ataupun di antara tanaman lain dalam jumlah terbatas. Sifat murbei yang membutuhkan sinar matahari dalam jumlah memadai cukup membuatnya sulit untuk tumbuh sebagai tanaman sela di lahan yang juga secara luasan terbatas.

Secara ekonomi, beberapa kajian ilmiah menunjukkan tanaman murbei yang multimanfaat. Wahyudi & Nurhaedah (2015) menguraikan manfaat ekonomis tanaman murbei selain sebagai pakan ulat sutra, juga

dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pangan, pakan ternak, dan obat-obatan. Pengetahuan masyarakat yang masih minim ditambah tingginya desakan kebutuhan menyebabkan masyarakat enggan dan tidak mau bertaruh pada usaha yang diasumsikan belum jelas nilai jual dan pemasarannya.

Selain secara ekonomi, tanaman murbei memiliki nilai tambah lainnya secara ekologis, apabila dibandingkan tanaman jagung dan palawija lainnya, murbei tergolong sebagai tanaman konservasi karena akarnya yang kuat. Murbei cocok ditanam untuk memperkuat teras pada lahan yang miring sehingga dapat mencegah laju erosi dan longsor. Hanya saja masyarakat memilih berpikir praktis, mengutamakan rasionalitas ekonomi, meminimalisasi risiko kegagalan dengan menyampingkan pertimbangan lainnya bahwa murbei terbukti bermanfaat secara ekologis ataupun bernilai sosial dan budaya. Pada akhirnya, tuntutan kebutuhan menjadi alasan utama pemilihan jenis komoditas yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi.

Di Kabupaten Wajo, pamor komoditas sutra menurun karena adanya gangguan penyakit, seperti virus dan bakteri yang menyerang tanaman murbei sehingga produksi benang sutra alam menurun drastis. Menurunnya tingkat produksi kokon sangat memengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Kesulitan sumber bahan baku yang berkualitas, serangan hama dan virus yang tidak pernah tertangani tuntas, serta persaingan usaha sutra di tingkat atas, pasar, dan modal yang masih dikuasai oleh segelintir elite usaha merupakan faktor internal yang harus dibenahi secara serius (Ridwan 2011).

Kelesuan ini semakin terlihat dari turunnya minat masyarakat terhadap tanaman murbei. Tahun 2020—2021, target program GERBANG EMAS melalui peningkatan produksi sutra dengan penanaman sejuta bibit murbei sebanyak 1 juta bibit sulit tercapai. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan di bulan Juli 2021, bantuan 1 juta bibit yang diberikan kepada masyarakat Wajo baru tertanam sekitar 491 ribu bibit. Saat diwawancarai, Abdul Malik sebagai praktisi sekaligus birokrat yang setia mengawal kelompok-kelompok usaha sutra menyayangkan rendahnya minat masyarakat terhadap pengembangan tanaman murbei di Kabupaten Wajo. Pasalnya, kabupaten tetangga (Enrekang dan Soppeng) yang berada di sektor hulu juga mulai lesu sehingga diharapkan agar industri sutra di sektor hilir di Kabupaten Wajo dapat dipenuhi sendiri tanpa bergantung lagi dengan daerah lain.

Kerumitan persoalan yang dihadapi oleh para pegiat sutra tidak serta-merta menyapakan industri sutra rumahan. Para perempuan di Kelurahan Wallanae, khususnya di kampung Canru menunjukkan semangat untuk tetap bertahan. Namun, konsekuensi atas pilihan ini berdampak pada bertambahnya beban kerja perempuan yang ditandai dengan peningkatan alokasi waktu untuk pekerjaan nondomestik. Firzal (2021) menghitung durasi waktu yang harus dialokasikan sebagai petani sutra di Kelurahan Wallanae, mulai dari kegiatan budi daya tanaman murbei, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga panen antara 3—4 bulan rata-rata sebanyak 3—4 jam per hari.

Penambahan waktu tersebut terjadi jika kondisi tanaman murbei pada lahan berbentuk kebun dengan cakupan luas minimal 1 hektare tetap tersedia. Durasi tersebut akan berkurang jika lahan garapan murbei hanya dijumpai di pekarangan saja. Tentunya hal ini berimbas pada menurunnya pendapatan karena produktivitas di sektor hulu juga berkurang.

Gambaran penambahan beban kerja yang berdampak pada penambahan waktu kerja nondomestik perempuan menjelaskan bahwa peran perempuan untuk mendukung perekonomian rumah tangga sangat besar. Mereka rela menjadi pemain tunggal demi terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, meskipun proses yang dijalankan belum menjamin hasil akan sesuai seperti yang diharapkan. Sekat peran berdasarkan faktor biologis telah hilang dan berganti menjadi kesetaraan peran demi meningkatnya pendapatan rumah tangga.

Perempuan-Perempuan Pegiat Sutra: Pelaku Ekonomi dan Pelestari Budaya

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, sutra merupakan pakaian mewah yang melambangkan status sosial, ekonomi, sekaligus budaya bagi sang pengguna. Industri tenun sutra Sulawesi Selatan merupakan warisan kerajinan turun-temurun yang sudah dilakoni oleh masyarakat sejak dahulu. Perjalanan sutra dari masa ke masa tidak lepas dari tangan-tangan para perempuan yang telah menggeluti sutra. Aktivitas tenun awalnya dianggap sebagai pekerjaan sampingan nondomestik yang menandakan kedewasaan dan kecakapan perempuan. Perempuan harus bisa memintal benang dan menenun sebagai simbol bahwa mereka telah memasuki usia dewasa.

Kontribusi perempuan dalam membantu peningkatan ekonomi rumah tangga sejak dulu sudah terjadi dalam usaha sutra untuk skala industri rumah

tangga. Fenomena ini bukan semata dilandaskan oleh motif ekonomi, tetapi juga memiliki latar belakang kesejarahan yang bermakna sosial. Nilai lain yang tidak kalah penting adalah sebagai identitas budaya.



Gambar 3. Ragam Motif Sutra Sulawesi Selatan

Sumber: BPSKL Sulawesi (2021)

Sulawesi Selatan sebagai daerah yang terkenal menghasilkan sutra selalu menghadirkan ornamen sutra dalam ritual-ritual adat. Sutra sebagai pakaian adat atau sebagai bagian dari perlengkapan sakral pada ritual peralihan usia remaja perempuan dan laki-laki, peralihan melepas masa lajang ke jenjang rumah tangga, dan sebagainya.

Masa lalu sutra membawa cerita tentang relasi kesejarahan antara perempuan dengan aktivitas tenun-menun. Keterampilan menenun di sebagian daerah merupakan simbol harga diri dan harkat perempuan. Menenun menjadi bekal keterampilan yang wajib dikuasai oleh perempuan. Selain sebagai modal untuk membantu suami secara finansial, menenun pun menjadi modal untuk berjaga-jaga dari kondisi buruk yang tidak diinginkan.

Dalam wawancara tanggal 22 Desember 2021, Andi Aisyah perempuan pegiat Sutra (80 tahun) mengungkapkan bahwa aktivitas memintal benang hingga menenun membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan ketelitian. Dahulu, perempuan yang mampu memintal benang dan menenunnya menjadi sutra dianggap sebagai perempuan yang sudah dewasa dan siap memasuki jenjang pernikahan. Dalam budaya Sulawesi Selatan, secara adat, perempuan diposisikan sebagai istri, selain harus pandai melayani, harus juga

pandai memosisikan diri sebagai mitra suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Para perempuan pegiat sutra lokal tetap bertahan menjalankan peran dalam industri sutra meskipun tidak lagi dapat mengandalkan laki-laki sebagai mitra kerja. Sebagai industri berskala mikro (*home industry*), sutra telah terbukti menjadi penopang perekonomian. Hal ini masih menjadi motivasi kuat para perempuan pegiat sutra untuk tetap bertahan. Mereka mengakui bahwa dari dulu hingga saat ini harga jual komoditas sutra stabil bahkan cenderung meningkat.

Secara ekonomi, industri sutra rumahan ikut andil berkontribusi meningkatkan dan/atau mempertahankan pendapatan rumah tangga. Dalam wawancara tanggal 23 Desember 2021, Hadrah (60 tahun) mengungkapkan hasil penjualan benang yang dihasilkan bisa mencapai Rp600.000,00 per kg. Kajian Firzal (2021) juga menyatakan pendapatan yang diperoleh dari lahan murbei sebesar Rp10.793.156,00 per hektare per musim dengan asumsi pakan murbei untuk produksi ulat sutra akan menghasilkan kira-kira 60 kg benang pintal.

Pertumbuhan unit industri tenunan sutra di daerah Sulawesi Selatan berakar dari kerajinan tenun-menun yang proses pengerjaannya cukup rumit karena dikerjakan secara manual menggunakan alat tenun tradisional yang berkonstruksi sederhana. Alat Tenun Tradisional (ATT) ini disebut *gedogan* yang hanya bisa menghasilkan tenunan selebar rentangan tangan perajin.

Industri tenunan sutra di Sulawesi Selatan semakin berkembang sejak digunakannya Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Peralatan tenun ini dapat menghasilkan tenunan dengan ukuran dan desain lebih beragam dalam waktu produksi yang lebih singkat. Untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi, ATBM memang lebih efektif serta menguntungkan bagi para perajin dan pengusaha. Seiring waktu, peralatan tersebut mulai ditinggalkan. Kebutuhan bahan baku yang banyak, tetapi ketersediaan terbatas, serta kelihaian, dan kenyamanan menggunakan ATT membuat perempuan penenun kembali ke ATT *gedogan*. Selain berkurangnya bahan baku, keterampilan menggunakan mesin ATBM serta biaya pemeliharaan mesin atau biaya membeli alat baru menjadi alasan ditinggalkannya ATBM.



Gambar 4. Aktivitas Pemintalan Benang Sutra dari Kokon Menggunakan Alat Pintal Tradisional

Sumber: BPSKL Sulawesi (2021)

Perempuan-perempuan pegiat sutra ini bertahan karena melihat nilai ekonomi yang dihasilkan masih tinggi sehingga tetap dijalankan, kendati hanya sebagai usaha sampingan bukan sebagai pekerjaan utama. Seluruh peran dalam proses industri sutra kini bersandar pada para perempuan. Sayangnya, fasilitas untuk mendukung pengembangan kapasitas diri belum memadai. Peningkatan kapasitas yang seharusnya mereka dapatkan juga masih minim. Hasilnya, peningkatan ekonomi rumah tangga melalui upaya mempertahankan industri sutra rumahan belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan. Terdapat kekhawatiran jika desakan kebutuhan ekonomi terus meningkat, pilihan untuk bertahan dalam industri sutra berpeluang sirna.

Pergeseran lain akan membawa perubahan struktur dalam rumah tangga. Perempuan yang awalnya fokus membantu peningkatan ekonomi dari usaha sutra lambat laun akan dituntut melakukan pekerjaan lain untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Secara peran, para perempuan tetap saja menjadi pelaku ekonomi meskipun untuk sektor lain. Di sisi lain, bila berpindah profesi para perempuan pegiat sutra akan dianggap gagal melestarikan sutra sebagai warisan budaya leluhur. Generasi mendatang akan kehilangan satu identitas budaya yang menjadi simbol kebanggaan daerah, yakni sebagai penghasil sutra terbesar.

Kendala fasilitas dan kapasitas menjadi tantangan berkembangnya industri sutra yang berskala industri rumahan. Karakter industri sutra yang bersifat warisan usaha keluarga yang secara turun-temurun juga dikerjakan oleh anggota keluarga, khususnya perempuan. Akibatnya, dari tahun ke tahun jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang terserap tidak mengalami

peningkatan signifikan. Kapasitas usaha pun sulit berkembang dengan baik karena industri rumah tangga memiliki karakter yang berbeda dengan industri murni.

Dalam mengoperasikan industri rumahan, pengambilan keputusan cenderung dipengaruhi oleh faktor internal keluarga atau faktor-faktor emosional lainnya. Penggunaan kapital menjadi terbatas karena tidak luwes. Akibatnya, produksi cenderung mengalami stagnasi atau perkembangan yang lambat.

Pendapat Susatijo (2008) menyatakan bahwa "persuteraan alam mempunyai peran yang cukup strategis, antara lain karena dapat melibatkan tenaga kerja termasuk petani, membuka kesempatan usaha, memberi kesempatan mengembangkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan devisa negara". Kondisi itu dapat terwujud jika mampu mengurangi kendala-kendala yang ada sehingga bukan hanya sektor ekonomi lokal dan global yang akan meningkat, tetapi warisan budaya pun akan terjaga.

Keberpihakan Program Perhutanan Sosial: Tantangan Memberdayakan Perempuan

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pasal 3 huruf d, memandatkan program Perhutanan Sosial untuk dapat "meningkatkan kemampuan, mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal."

Perhutanan Sosial secara detail dijabarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peraturan Nomor 9 Tahun 2021 yang secara teknis menjelaskan mekanisme persetujuan kepada masyarakat yang ingin mengelola kawasan hutan dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, Hutan Rakyat, dan Hutan Adat. Mekanisme persetujuan pengelolaan terbuka umum tanpa adanya perbedaan hak dan kewajiban pada masyarakat yang secara fisik, sosial, ekonomi, bahkan budaya memiliki kedekatan dan ketergantungan pada hutan.

Program Perhutanan Sosial hadir sebagai penyeimbang program kehutanan lainnya yang selama ini hanya berpihak pada segelintir kelompok elite. Program ini sekaligus mengakomodasi amanat Pasal 23 Undang-Undang Kehutanan bahwa hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-

besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu.

Melalui Perhutanan Sosial, pemanfaatan hutan harus didistribusikan secara berkeadilan melalui keterlibatan aktif dari masyarakat. Harapannya, masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya. Bukan itu saja, Perhutanan Sosial juga memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses pengelolaan perhutanan sosial. Tersurat pada pasal-pasal Peraturan Menteri LHK No. 9/2021 tentang Perhutanan Sosial, di antaranya menyebutkan "1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan."

Keterlibatan laki-laki dan perempuan secara berimbang terlihat dari peran aktif kelompok-kelompok perhutanan sosial. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) untuk wilayah Sulawesi (2021) mengidentifikasi sebanyak 168 kelompok perhutanan sosial untuk Sulawesi Selatan yang telah memberdayakan para petani hutan dengan distribusi pembagian peran laki-laki dan perempuan secara adil. Rasio keanggotaan perempuan dalam lembaga perhutanan sosial tersebut mencapai angka 53,98%. Peran yang cukup besar untuk menggambarkan proporsi peran berdasarkan gender.

Dari kelompok-kelompok tersebut terdapat di antaranya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah memanfaatkan dan mengelola hasil hutan bukan kayu, yakni murbei dan ulat dengan produk turunannya berupa sutra. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh kelompok-kelompok yang memanfaatkannya sebagai produk usaha merupakan salah satu target sasaran perhutanan sosial dalam memberdayakan kelompok-kelompok yang rentan secara fisik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Salah satu wujud dukungan pemerintah pusat maupun daerah demi mendorong program perhutanan sosial supaya turut hadir pada pengelolaan hasil hutan bukan kayu di lahan-hutan rakyat ialah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah melakukan aktivitas pengolahan hasil. Sutra di Kabupaten Wajo merupakan produk hasil hutan bukan kayu yang telah dikelola oleh Kelompok-kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan secara legal telah menjadi pemegang izin atau hak perhutanan sosial.

Kelompok-kelompok yang telah terdaftar sebagai KUPS berhak mendapatkan fasilitas pengembangan usaha perhutanan sosial sesuai tingkat kemampuan kelompok yang dibagi menjadi empat tingkatan.

Tingkatan tersebut secara berurut dari tingkat terendah sampai tertinggi, yakni *Blue, Silver, Gold*, dan *Platinum*.

Mengacu pada Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No. 2/2018 tentang Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, beberapa fasilitas yang dapat diperoleh di antaranya; 1) Kegiatan pendampingan untuk menyusun rencana usaha melalui pemanfaatan hasil hutan; 2) Penguatan kelembagaan berupa sekolah lapang, studi banding, pelatihan peningkatan *skill*, peningkatan status badan usaha kelompok; 3) Peningkatan nilai produksi dan jasa lingkungan berupa bantuan alat ekonomi produktif, agroforestri, peningkatan nilai produksi; dan 4) Penguatan kewirausahaan berupa temu usaha,

pameran/promosi produk, akses modal dan pemasaran, jaringan mitra usaha.

Kelompok-kelompok usaha Perhutanan Sosial Sutra yang berada di Kabupaten Wajo secara keseluruhan dinilai sebagai kelompok *Silver* dengan kondisi usaha belum sepenuhnya berkembang, tetapi secara kelembagaan sudah terbentuk dan berjalan. Terdapat dua kelompok usaha perhutanan sosial tingkat *Silver* yang dipimpin oleh perempuan. Keduanya merupakan contoh keterwakilan perempuan di Kabupaten Wajo yang telah memperoleh akses untuk ikut serta berperan memelihara ekosistem hutan sekaligus mengambil manfaat ekonomi dengan melakukan proses-proses pengelolaan. Pengelolaan sutra adalah kegiatan produksi yang di dalamnya membutuhkan keterlibatan perempuan secara serius.

Tabel 1. Pemberdayaan Perempuan dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sutra Alam

Kelompok Tani/Level	Ketua	Pemberi Bantuan	Bantuan yang telah diterima
1. Panreng-Panreng (<i>Silver</i>)	Hajera	BPSKL Wilayah Sulawesi & Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	- Bibit telur ulat sutra F1 - Bibit tanaman murbei - Mesin pengering kokon
2. Sejahtera (<i>Silver</i>)	Sitti Hadrah	BPSKL Wilayah Sulawesi	- Bibit telur ulat sutra F1 - Keranjang pakan ulat sutra - Alat pengokonan - Keikutsertaan anggota KT Sejahtera pada pelatihan <i>E-learning</i> Perhutanan Sosial - <i>Cultivator</i>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder KUPS-BPSKL Wilayah Sulawesi (2021)

Dalam pengembangannya, produksi sutra membutuhkan dukungan yang lebih dari sebelumnya. Kehendak politik yang baik dari pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam mendukung sutra sebagai produk unggulan lokal yang memiliki peluang pasar global. Dukungan yang diharapkan adalah dukungan yang tidak semata memberikan bantuan

dengan mengabaikan kendala yang dihadapi oleh para pegiat sutra, khususnya perempuan. Industri sutra bukanlah jenis usaha yang baru, melainkan sudah terjadi secara turun-temurun sehingga permasalahan yang dihadapi dari masa ke masa seharusnya telah terpetakan. Pemetaan masalah tersebut menjadi acuan untuk menemukan jalan keluar yang bersifat jangka panjang.

Tabel 2. Manfaat dan Kendala Program-Bantuan yang Diterima oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sutra Alam

Program/Bantuan g diterima		Kendala
Bibit telur ulat s F1	Telur ulat sutra F1 merupakan bahan utama yang dibutuhkan dalam budi daya ulat sutra, telur ini yang akan dipelihara sampai menghasilkan kokon.	Penanganan saat proses distribusi telur ulat sutra F1 ke kelompok menggunakan jasa ekspedisi sering kali menyebabkan rendahnya persentase penetasan telur ulat sutra.
Bibit tanaman murbei	Tanaman murbei merupakan pakan untuk ulat sutra, bibit yang berkualitas akan berpengaruh terhadap kualitas kokon yang dihasilkan.	Hanya sebagian kecil yang ditanam oleh kelompok karena persoalan teknis dengan penyedia bibit.

Program/ Bantuan g diterima		Kendala
Mesin pengering kokon	Membantu menyimpan kokon dalam jangka waktu yang lebih lama.	-
Keranjang pakan ulat sutra	Untuk menampung tanaman murbei yang diambil dari kebun agar tetap terpelihara kesegaran dan kebersihannya.	-
Alat pengokonan seriframe	Alat pengokonan modern untuk menghasilkan kokon yang berkualitas dibandingkan jika menggunakan alat tradisional berupa bambu sisir.	Sebagian anggota kelompok masih menggunakan alat pengokonan tradisional berupa bambu sisir karena dianggap lebih mudah penggunaannya dibandingkan alat pengokonan seriframe.
Keikutsertaan anggota KT Sejahtera pada pelatihan <i>E-learning</i> Perhutanan Sosial	Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang program Perhutanan Sosial serta tips mengembangkan kelompok dengan memanfaatkan fasilitas yang dapat diperoleh dari BPSKL.	Sebagian anggota kelompok belum melek teknologi sehingga tidak efektif.
<i>Cultivator</i>	Alat untuk menyingi rumput dan menggemburkan lahan dan kebun sebelum penanaman bibit murbei.	-

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer KUPS-BPSKL Wilayah Sulawesi (2021)

Keberpihakan pemerintah telah ditunjukkan melalui proses pemberdayaan melalui pemberian akses dan bantuan-bantuan fisik yang telah disalurkan ke kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial. Berdasarkan realitas yang ada, tidak semua bantuan yang diberikan berbasis pada kebutuhan kelompok. Beberapa bantuan cenderung dilakukan tanpa proses diskusi sehingga masih terkesan *top-down* dan temporer. Pada akhirnya, bantuan yang diberikan belum mampu menjamin peningkatan kesejahteraan secara signifikan. Masih banyak kendala yang harus dibenahi.

Maksud baik pemerintah belum sepenuhnya berjalan dalam koridor pemberdayaan. Ada kesan bantuan yang diberikan masih bersifat *top-down*. Ini terlihat pada pemberian bibit murbei yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah harus mencapai jumlah yang telah ditetapkan. Satu juta bibit murbei adalah angka yang ditetapkan tanpa memperhitungkan keberadaan lahan, kualitas bibit, dan kebutuhan masyarakat terhadap komoditas lainnya. Tidak dilakukan diskusi atau penyadaran terhadap masyarakat tentang manfaat menunjukkan nilai utama tanaman murbei, baik secara ekonomi maupun ekologi. Hal ini memberi kesan bahwa belum terjadi dialog yang harmonis antara pemerintah dengan para pegiat sutra.

Kendala lain adalah akses untuk peningkatan kapasitas para pegiat sutra yang harus siap bersaing dengan industri-industri sutra yang sudah mapan. Satu bentuk fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan adalah bantuan akses kerja sama dengan pihak swasta yang berpotensi menjadi mitra. Kehadiran pihak swasta

akan sangat membantu dalam hal permodalan dan pemasaran. Mereka membutuhkan modal dan keahlian yang memadai.

Masyarakat diberi bantuan alat, tetapi mereka tidak dibekali secara memadai teknik penggunaan dari alat tersebut. Para pegiat sutra lebih nyaman melakukan pekerjaan pengokonan dengan alat tradisional karena mereka telah terbiasa selama bertahun-tahun dengan alat tersebut. Salah satu kelemahan dari proses produksi sutra lokal yang berskala industri rumahan adalah mereka masih saja menggunakan cara-cara tradisional yang nilai efektivitas dan produktivitasnya tidak akan mampu bersaing dengan produsen-produsen besar mancanegara, seperti Cina dan India. Sifat masyarakat pedesaan yang cenderung nyaman di zona sederhana pun terlupakan.

Akses untuk memperoleh bantuan telah terpenuhi, meskipun bantuan yang diperoleh belum optimal untuk dimanfaatkan. Pemberian akses lainnya adalah peningkatan kapasitas berupa wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna untuk membangun motivasi serta meningkatkan produktivitas pengelolaan sutra. Peningkatan kapasitas diri dapat diperoleh melalui pendampingan serta mengikutsertakan mereka dalam pelatihan maupun studi banding ke daerah yang memiliki cerita sukses mengelola sutra.

Pengalaman pahit lainnya pernah dialami oleh para pegiat sutra perempuan di Kelurahan Walanae, Kabupaten Wajo. Dalam wawancara tanggal 22 Desember 2021, Abdul Malik (40 tahun) menyampaikan penyesalannya karena belum mampu memperjuangkan para tokoh

perempuan untuk diikutsertakan dalam pelatihan sutra di Thailand. Alasan klasik terkesan diskriminatif menjadi penyebab tidak dipilihnya para perempuan pelaku industri sutra, yakni karena pendidikan perempuan pegiat sutra hanya tamatan SD. Padahal, pengetahuan, pengalaman, wawasan, serta partisipasi mereka terhadap persuteraan jauh lebih luas dibandingkan dengan yang terpilih ikut. Para perempuan pegiat sutra belum menjadi prioritas untuk mendapatkan peningkatan kapasitas secara memadai.

Kontrol dari pemimpin daerah selaku wakil pemerintah di tingkat tapak sangat menentukan arah kebijakan yang membawa perubahan ke arah yang baik. Kendala-kendala yang terjadi menjadi pekerjaan lanjutan bagi pemerintah untuk membantu kelancaran produksi melalui proses-proses pemberdayaan.

Prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti komunikasi, partisipatif, dan saling terbuka tetap menjadi landasan agar mampu memenuhi amanat dari UU Kehutanan secara utuh. Pemberdayaan masyarakat tidak berarti bahwa masyarakat benar-benar tidak memiliki kemauan atau bahkan kemampuan sehingga mereka dianggap sebagai kelompok yang tidak berdaya. Mereka telah bertahan hidup sejauh ini karena potensi yang dimiliki. Mereka hanya butuh dibekali sesuai dengan kebutuhan yang ada agar potensi dalam diri mereka dapat dikembangkan dan dioptimalkan agar lebih berdaya guna, lebih produktif, dan lebih mandiri secara finansial.

Perempuan Pegiat Sutra dalam Analisis Gender: Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat

Sejalan dengan konsep ekonomi politik, Georgina Waylen (1997) dalam karyanya yang berjudul *Gender, Feminism, and Political Economy* menyatakan bahwa teori feminisme dan analisis gender memiliki peranan penting dalam penciptaan ekonomi politik. Hal ini disebabkan peran perempuan dalam ekonomi lokal menunjang adanya pertumbuhan ekonomi yang setara dan mampu menyebabkan terjadinya perubahan politik ekonomi. Sutra sebagai hasil industri yang telah terbukti pernah berjaya dan menjadi penyokong perekonomian rumah tangga di beberapa daerah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat ketika perempuan

turut mengambil peran. Kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan ekonomi politik berbasis kesetaraan gender memang diperlukan. Amartya Sen (1999) dalam bukunya *Development as Freedom* memberikan ide pembaruan tentang peningkatan kemampuan manusia merupakan salah satu perhatian utama dalam mekanisme pekerjaan. Manusia mencakup laki-laki dan perempuan. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan harus dihapuskan dalam pengelolaan ekonomi politik.

Riset yang dilakukan oleh Klasen & Lamanna (2009) dalam jurnal yang berjudul *The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on Economic Growth in Developing Countries* mempertegas bahwa ketimpangan gender dalam dunia kerja hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan perempuan menjadi solusi untuk menghilangkan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga peran perempuan dalam melakukan pertumbuhan ekonomi dapat optimal. United Nation Development Programme (UNDP) juga menyatakan dalam *Human Development Report* bahwa salah satu hal penting dalam pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang merata antargenerasi, antaretnis, antargender, maupun antarwilayah dengan salah satu dimensi yang ditekankan oleh UNDP adalah kesetaraan gender (Widayanti et.al 2013).

Dalam hal implementasi program Perhutanan Sosial dari HHBK Sutra di Kabupaten Wajo, penulis menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) untuk melihat posisi perempuan. GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan GAP, para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut (Nurhaeni 2018). Dengan GAP, kita mampu mengidentifikasi kesenjangan gender, dari segi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM).

Tabel 3. Analisis APKM Perempuan Pegiat Sutra

Akses	<p>Secara hukum, program KUPS berbentuk bantuan materiel untuk peningkatan usaha (barang/uang), maupun nonmateriel untuk peningkatan kapasitas SDM (pelatihan/studi banding) yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, bantuan berupa nonmateriel masih lebih banyak diakses oleh laki-laki.</p> <p>Hal ini terjadi karena masih ada stereotip gender yang menganggap bahwa perempuan sebagai sosok pemalu, kecerdasannya masih di bawah laki-laki, serta tidak pandai mengelola program. Dengan stereotip yang demikian, akses perempuan terhadap kesempatan untuk peningkatan kapasitas SDM menjadi sangat terbatas. Pada banyak kasus, laki-laki cenderung lebih diutamakan untuk diberikan akses informasi berupa pelatihan maupun bantuan lainnya.</p>
Partisipasi	<p>Secara keanggotaan, kelompok-kelompok KUPS Persuteraan sudah didominasi oleh perempuan. Peran mereka terlihat mulai dari keterlibatan saat melakukan penyusunan rencana secara musyawarah serta saat melakukan penguatan usaha melalui pemanfaatan alat-alat produktif pengolahan sutra.</p> <p>Lebih jauh, partisipasi dan keaktifan perempuan dalam rapat pembahasan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait juga cukup baik, meskipun secara kuantitas, kehadiran peserta masih dibatasi, yakni hanya diwakili oleh pengurus inti.</p> <p>Meskipun begitu, dalam hal peningkatan kapasitas SDM, partisipasi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, seperti pada saat mengikuti pelatihan <i>e-learning</i> ataupun studi banding.</p>
Kontrol	<p>Perempuan sebagai anggota dari KUPS memiliki kontrol terhadap rencana kerja kelompok. Dalam penyusunan rencana kerja (pendek, menengah, dan panjang) beserta penentuan kebutuhan program untuk peningkatan KUPS dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama seluruh anggota. Selanjutnya, ketua menandatangani dokumen administrasi KUPS dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan program-program KUPS. Selain itu, ketua juga mendorong agar terjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan badan usaha lain. Meski demikian, kontrol perempuan anggota sangat terbatas karena perannya sebagai anggota.</p> <p>Lebih jauh, aspek kontrol ini sangat dipengaruhi oleh posisi strategis perempuan dalam KUPS, salah satu indikatornya yakni posisi perempuan sebagai ketua. Dari sembilan KUPS Sutra yang berada di Kabupaten Wajo, terdapat dua Ketua KUPS perempuan dan dinilai mampu mendistribusikan pekerjaan kepada anggota (laki-laki ataupun perempuan) sekaligus mengontrol pelaksanaan pekerjaan. Rasio 2:9 ini masih dianggap terlalu rendah dan belum merepresentasikan setidaknya 30% kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, kontrol perempuan terhadap KUPS masih minim.</p> <p>Representasi perempuan sebagai ketua diharapkan dapat mendorong akses dan partisipasi perempuan dalam seluruh rangkaian kegiatan KUPS, mulai dari akses bantuan, akses pelatihan, hingga akses ke pengambilan keputusan.</p>
Manfaat	<p>Program KUPS secara skema tidak membedakan manfaat yang diberikan secara jenis kelamin. Meskipun demikian, dapat dilihat bahwa minimnya akses, partisipasi, dan kontrol berdampak pada rendahnya manfaat yang diterima oleh perempuan sebagai anggota, pengurus, maupun ketua.</p> <p>Lebih jauh, manfaat yang dimaksud, yakni bersifat materiel dan nonmateriel. Manfaat materiel adalah manfaat berupa peningkatan usaha, keuntungan, dan pendapatan. Sementara itu, manfaat nonmateriel adalah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM yang dalam hal ini adalah perempuan melalui pelatihan kepada para anggota kelompok perempuan.</p> <p>Dalam hal manfaat materiel, program ini telah memberikan manfaat bagi perempuan yang terlibat dengan adanya peningkatan usaha, keuntungan, dan pendapatan. Namun, dalam hal manfaat nonmateriel, akses perempuan masih belum maksimal.</p>

Sumber: Diolah Penulis dari Data KUPS BSKL Sulawesi

Dari analisis APKM perempuan pegiat sutra, secara tersirat, kesenjangan gender masih terjadi dalam hal pemberian akses untuk bantuan nonmateriel. Program peningkatan kapasitas SDM pada pihak perempuan belum optimal, meskipun keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam industri sutra telah ada bahkan secara nyata beberapa di antara mereka menjadi tulang punggung keluarga. Kecenderungan pemerintah memberikan kesempatan masih lebih terbuka kepada laki-laki karena kualifikasi tertentu yang tidak

dimiliki oleh perempuan. Kepemimpinan, akses, dan kontrol terhadap pemanfaatan program usaha belum sepenuhnya diberikan secara bermakna bagi kelompok perempuan (yang notabene sebagai pemain tunggal di industri sutra). Kondisi tersebut akan menghambat diperolehnya manfaat lebih KUPS Sutra untuk peningkatan pendapatan rumah tangga yang juga akan berimbas pada menurunnya bahkan hilangnya industri sutra di pedesaan.

Penutup

Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam proses industri sutra telah ada sejak dulu. Tingginya tekanan dan desakan kebutuhan hidup menyebabkan terjadinya peralihan peran perempuan. Beralihnya kebun-kebun murbei menjadi kebun jagung atau jenis palawija lainnya menyebabkan terjadinya diversifikasi mata pencaharian dalam rumah tangga petani pegiat sutra. Pola nafkah tunggal pun berubah menjadi pola nafkah ganda. Hal ini terlihat dari peran perempuan dalam usaha sutra lokal menjadi dominan, meskipun pergeseran dan peralihan peran yang terjadi masih terbatas pada skala industri rumah tangga dengan produktivitas yang juga masih rendah.

Tantangan besar untuk tetap mempertahankan sutra di tingkat lokal kini ada di pundak para perempuan pegiat sutra. Keberlanjutan usaha ini juga menjadi penentu punah, bertahan, atau berjaya kembali sutra-sutra lokal di masa mendatang. Kondisi ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak. Pemberian akses kepada para perempuan pegiat sutra untuk terlibat dalam program-program pemberdayaan merupakan salah satu wujud keberpihakan pemerintah kepada industri lokal sutra. Mereka berhak untuk terlibat atau terwakilkan dalam setiap tahap pembangunan, khususnya terkait dengan pembangunan usaha lokal sutra.

Beberapa data dan fakta di lokasi terpilih (Kampung Canru, Kelurahan Wallanae, Kabupaten Wajo) menunjukkan masih rendahnya keterlibatan perempuan pegiat sutra dalam proses pengambilan keputusan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan kebijakan, akses untuk memperoleh informasi, hingga peningkatan kapasitas. Stereotip tentang perempuan lemah, bodoh, tertinggal masih saja melekat di beberapa pemikiran para pengambil kebijakan. Benturan gender justru terlihat di tingkat pengambilan kebijakan dan perencanaan, berbeda dengan yang terjadi di tingkat pelaksanaan, kesetaraan gender terlihat berjalan baik.

Ketimpangan gender di tingkat perumusan kebijakan dan perencanaan mencerminkan konsep pengarusutamaan perspektif gender yang dikemukakan oleh Dewan Sosial dan Ekonomi PBB belum mampu diimplementasikan. Proses penilaian implikasi-implikasi terhadap perempuan dan laki-laki terhadap kegiatan telah direncanakan, termasuk perundangan, kebijakan atau program, di segala bidang dan di berbagai tingkat dan sebagai strategi. Perhatian dan pengalaman perempuan serta laki-laki menjadi bagian dalam desain, implementasi, pemantauan, dan evaluasi dari kebijakan-kebijakan serta program-program di bidang politik,

ekonomi, dan bidang-bidang lain di masyarakat. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat dan memiliki tanggung jawab yang sama.

Kehadiran pemerintah melalui program Perhutanan Sosial menjadi salah satu pemecah masalah di antara beberapa persoalan yang dihadapi. Dukungan akses untuk mendapatkan bantuan dan program-program pemberdayaan masyarakat menjadi motivasi bagi kelompok pegiat sutra untuk terus produktif. Proses pemberdayaan yang berjalan masih membutuhkan perbaikan serta pembenahan agar bantuan yang diterima masyarakat menjadi program yang tepat guna dan tepat sasaran. Beberapa prinsip dalam proses pemberdayaan masyarakat terlupakan.

Selain itu, kerja sama dan dukungan dari beberapa pihak juga dibutuhkan. Peran pemerintah di sektor kehutanan harus berjalan seiring dengan sektor lain yang juga menjadi penentu bangkitnya industri sutra lokal. Permodalan oleh para investor, pengembangan kapasitas, keterampilan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri, pemasaran oleh sektor pariwisata, dan banyak lagi sektor lainnya yang perlu saling bersinergi. Era pembangunan saat ini adalah kolaborasi dengan memadukan semua sumber daya yang ada untuk mengisi kekurangan dan kekosongan.

Secara internal, kondisi-kondisi tersebut harus dapat diatasi untuk memperkuat motivasi para perempuan pegiat sutra agar tetap bertahan. Selain itu, secara eksternal, tantangan tersebut menjadi semakin rumit dengan arus globalisasi yang membawa budaya luar dan memengaruhi masyarakat dalam hal berpakaian. Kuatnya arus budaya luar, sedikit banyak telah memengaruhi keberadaan sutra. Rasa bangga untuk memiliki dan menggunakan sutra perlahan pudar. Tren pakaian dari luar negeri menjadi pijakan kaum muda bahkan perempuan secara umum. Kaderisasi perempuan dalam pengelolaan sutra lokal juga menjadi tantangan yang menentukan masa depan sutra.

Tantangan industri sutra lokal, khususnya pada tingkat industri rumahan merupakan tantangan untuk semua pihak, bukan hanya bertumpu pada pundak perempuan-perempuan pegiat sutra yang berada di pedesaan dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Komitmen kuat para pihak untuk mengembalikan kejayaan sutra menjadi fondasi penting untuk bersinergi menyalurkan dan menambahkan daya energi yang masih tersisa di tangan-tangan tangguh para perempuan pegiat sutra. Proses pemberdayaan melalui peningkatan akses dan kontrol terhadap seluruh sumber daya mutlak diberikan secara adil dan berimbang. Proporsi berdasarkan distribusi

peran yang bertumpu pada perempuan merupakan realitas sosial yang harus menjadi dasar pemberian akses dan kontrol untuk memanfaatkan setiap peluang dan sumber daya yang ada.

Perhutanan Sosial sebagai salah satu program pemerintah yang mendukung keberlanjutan industri sutra selayaknya mampu mewujudkan pembangunan sektor kehutanan yang memberikan akses dan kontrol pengelolaan secara adil. Hal ini demi mewujudkan sistem usaha kehutanan yang berdaya saing melalui kelola kawasan dan kelembagaan berbasis masyarakat. Sinergi di antara berbagai potensi serta sumber daya yang ada, yakni sumber daya alam, masyarakat, serta dukungan dari pemerintah dan swasta akan mempercepat tumbuhnya keberdayaan dalam diri para pegiat usaha sutra.

Daftar Pustaka

- Baso, I. & Sudirman. 2020. "Peranan Pemerintah dalam Memajukan Perusahaan Sutra di Sulawesi Selatan", *Southeast Asian Social Science Review*, Vol. 5, No. 1, hlm. 103—132. Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar.
- Balai Persuteraan Alam (BPA). 2013. *Inventarisasi Potensi Sutra*, Kementerian Kehutanan Ditjen Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Bili-Bili.
- Damayantanti, P.T. 2011. "Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat", *Jurnal Komunitas Research And Learning In Sociology and Anthropology* 3(1). Universitas Negeri Semarang.
- Firzal, M. 2021. *Peran Perempuan dalam Usahatani Murbei pada Kawasan Home Industry Kain Sutra di Kelurahan Walennae Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo*, Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kementerian Kehutanan. 2014. *Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013*. Kementerian Kehutanan: Jakarta.
- Klasen, S. & Lamanna, F. 2009. "The Impact Of Gender Inequality In Education And Employment On Economic Growth: New Evidence For A Panel Of Countries", *Journal Feminist Economics*, Vol. 15 No. 3, hlm. 91–132.
- Nurhaeni, I. 2018. *Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (Gap) Dan Gender Budget Statement (GBS)*, Australian Aid dan Australian Indonesia Partnership For Decentralisation, Jakarta.
- Ridwan 2011. *Fasilitasi Penelitian Persuteraan Alam di Provinsi Sulawesi Selatan: Tantangan Komprehensif Persuteraan Alam Di Sulawesi Selatan*, Institute For Social And Political Economic Issues, Makassar.
- Sen, A. 1999. *Development As Freedom*. Oxford University Press: Oxford.
- Susatijo, B. 2008. *Pengembangan Sutra Alam di Jawa Barat*. Makalah: Disampaikan pada Rapat Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Persuteraan Alam dengan Pendekatan Klaster di Jawa Barat, Cianjur.
- UU Kehutanan No. 41/1999.
- Wahyudi, I. & Nurhaedah, M. 2015. "Tanaman Murbei: Sumber Daya Hutan Multi-Manfaat". *Info Teknis Eboni*, Vol. 12 No. 2, hlm. 111–119.
- Waylen, G. 1997. "Gender, Feminism And Political Economy", *New Political Economy*, Vol. 2 No. 2.
- Widayanti, R. & Mauretya. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Upah Gender". *Jurnal Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur Dan Teknik Sipil*, Vol. 5, hlm. 303–307.

Catatan Akhir

- 1 Kokon adalah materi yang dibuat oleh ulat sutra (*Bombyx mori* L.) pada fase metamorfosa (proses pembentukan pupa), yang terdiri dari kulit kokon dan pupa, (SNI 01-5009.11-2002: MUTU KOKON SEGAR). Kokon juga biasa disebut sebagai kepompong ulat sutra.

